JNKA | Jurnal Nuansa Karya Akuntansi
Vol. 4, No 2, Agustus 2026, Hal 128-141 | e-ISSN: 2988-2702 (Online)
https://jnka.ppj.unp.ac.id/index.php/jnka

Pengaruh *Fiscal Stress, Legislature Size* dan *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SILPA) terhadap *Expenditure Change* Pemerintah Daerah di Indonesia

Khairina Tessa Salsabila[1*], **Fefri Indra Arza**[2], **Ade Elsa Betavia**[3]
[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
*Korespondensi: khairina.tesssa511@gmail.com

Abstract
The purpose of this study is to examine how changes in expenditures in local governments throughout Indonesian regencies and municipalities from 2020 to 2022 are impacted by fiscal stress, legislature size, and rebudgeting in time over budget calculation (P-SiLPA). Utilizing a quantitative approach with multiple regression analysis, the research investigates how fiscal constraints, legislative composition, and budget reallocation mechanisms impact governmental spending dynamics. The study analyzes financial reports from multiple local governments, exploring the complex interrelationships between fiscal stress indicators, legislative body characteristics, and budgetary adaptations. Findings reveal significant correlations between these variables and local government expenditure changes, highlighting the critical role of fiscal management strategies in responding to economic challenges and institutional constraints. By providing empirical insights into local financial governance, the research contributes to understanding the intricate factors influencing public sector financial decision-making and offers valuable implications for more responsive and efficient fiscal policy development in Indonesian local governments.

Keywords *: Expenditure Change: Fiscal Stress; Legislature Size; Local Governments; Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA).*

How to cite
Salsabila, K. T., Arza, F. I., & Betavia A. E. (2026). Pengaruh *Fiscal Stress*, *Legislature Size* dan *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SILPA) terhadap *Expenditure Change* Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 4 (2), 128-141. DOI: https://doi.org/10.24036/jnka.v4i2.159

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengelolaan keuangan daerah semakin kompleks dan menghadapi berbagai tantangan (Lhutfi et al, 2019). Strategi pengelolaan anggaran pemerintah daerah telah berubah secara signifikan, terutama ketika dihadapkan pada masalah eksternal seperti pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global. Situasi ini menyebabkan terjadinya revisi atau perubahan anggara (Ratifah & Nuraeni, 2021). Fokus utama penelitian ini adalah menguji secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi *expenditure change* pemerintah daerah, yaitu: *fiscal stress, legislature size,* dan *rebudgeting in time over budget calculation* (P-SiLPA).

Expenditure change digunakan oleh pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan kondisi yang tidak menentu. Ada sejumlah variabel internnal dan eksternal yang memengaruhi dinamika ini. Variabel-variabel ini termasuk *fiscal stress, legislature size* dan *rebudgeting in time over budget calculation* (P-SiLPA). Pemerintah daerah menghadapi masalah keuangan yang signifikan saat pendapatan menurun dan biaya meningkat untuk layanan kesehatan jaringan pengamanan sosial (Nur Rafli & Fitria Sari 2021). Penelitian-penelitian sebelumnya terkait *expenditure change* menghasilkan temuan yang beragam. Studi Amran & Darwanis (2015) serta Arief & Arza (2019) menunjukkan dampak *fiscal stress* yang signifikan terhadap *expenditure change* tetapi penelitian Junita & Abdullah (2016) menemukan hasil sebaliknya.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, perbedaan utama terletak pada cakupan geografis yang komprehensif, Dimana penelitian ini tidak berfokus pada satu wilayah melainkan meliputi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Aspek kebaruan lainnya adalah periode waktu penelitian yang sangat kritis yaitu tahun 2020-2022 yang mencakup masa pandemi COVID-19. Periode waktu ini memberikan kesempatan unik untuk menganalisis dampak guncangan eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sistem keuangan daerah. Penelitian ini mampu mengeksplorasi respons keuangan pemerintah daerah selama masa transisi pandemi dan menemukan mekanisme adaptasi fiskal dalam situasi ketidakpastian tinggi.

Masalah utama yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana dinamika *expenditure change* pemerintah daerah dipengaruhi oleh tiga faktor kunci yaitu *fiscal stress, legislature size*, dan *rebudgeting in time over budget calculation* (P-SiLPA). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah *fiscal stress* yang dialami pemerintah daerah, terutama selama pandemi 2020-2022, memiliki dampak yang signifikan terhadap pola *expenditure change* mereka. Selain itu, penelitian ini menyelidiki bagaimana komposisi dan *legislature size* daerah memengaruhi proses pengambilan keputusan anggaran dan konsekuensinya terhadap fleksibilitas pengeluaran. Mekanisme *rebudgeting in time over budget calculation* (P-SiLPA) merupakan elemen ketiga yang diteliti. Fokus penelitian adalah bagaimana sisa anggaran tahun sebelumnya memengaruhi pola *expenditure change* di tahun berikutnya. Penelitian ini berfokus pada kompleksitas interaksi antara ketiga faktor ini, dengan tujuan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang perilaku anggaran pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tekanan fiskal dan struktur.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang dinamika keuangan pemerintah daerah dan mengembangkan pemahaman teoritis tentang faktor-faktor yang memengaruhi fleksibilitas anggaran. Secara praktis, penelitian memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris, membantu pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran yang lebih responsif, dan menyediakan alat analisis untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori keagenan memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami dinamika penganggaran dan *expenditure change* di pemerintah daerah. Dalam akuntansi, *agency theory* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajemen. Hubungan keagenan terjadi ketika seseorang (prinsipal) memperkerjakan seseorang (agen) untuk menyediakan suatu jasa dan memberikan kepada agen tersebut kewenangan untuk membuat keputusan.

Sebagaimana dijelaskan oleh halim (2006), peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai perjanjian resmi antara eksekutif dan legislatif. Sebelum APBD dibuat, eksekutif dan legislatif menyetujui prioritas anggaran dan garis besar kebijakan KUA. Selanjutnya, rancangan anggaran diberikan kepada legislatif untuk dievaluasi dan dibahas sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Kontrak ini memungkinkan anggota legislatif untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan anggaran oleh eksekutif, meskipun hal ini dapat menciptakan tekanan signifikan pada eksekutif, termasuk dalam proses perubahan anggaran (Nur Rafli & Fitria Sari, 2021).

Dalam penelitiannya, Junita & Abdullah (2016) mengamati bahwa pengawasan publik terhadap proses perubahan anggaran cenderung tidak sekuat pada saat penyusunan anggaran awal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme partisipasi publik yang langsung selama proses perubahan anggaran. Selain itu, proses diskusi dan sosialisasi perubahan anggaran oleh legislatif juga relatif singkat. Ketika legislatif memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk membuat kebijakan, termasuk menyusun draf anggaran, muncullah permasalahan keagenan antara legislatif dan eksekutif.

Expenditure Change Pemerintah Daerah

Expenditure change atau perubahan anggaran merupakan mekanisme penyesuaian rencana keuangan pemerintah daerah terhadap perubahan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan anggaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Junita & Abdullah (2016), *expenditure change* mencakup perubahan alokasi dan kebijakan anggaran pemerintah daerah yang dapat diukur melalui selisih antara anggaran belanja dalam Perubahan APBD dan anggaran belanja dalam APBD murni. Proses *rebudgeting* ini merupakan metode yang digunakan pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan penganggaran, termasuk prediktabilitas, fleksibilitas, perubahan, akuntabilitas, kontinuitas, dan kontrol (Yossie Maysita R et al., 2018). *Expenditure change* memiliki peran strategis dalam melindungi nilai dari keputusan yang tidak pasti dan memungkinkan rasionalisasi anggaran dalam situasi yang tidak pasti.

Penelitian Junita & Abdullah (2016) mengidentifikasi tiga stimulus utama yang mendorong *expenditure change: managerial necessity* (penyesuaian teknis dalam proses pengambilan keputusan), tekanan lingkungan (adaptasi terhadap perubahan kondisi layanan publik), dan masalah politik (pertimbangan alokasi sumber daya). Perubahan APBD dimaksudkan untuk memastikan pencapaian program pemerintahan yang telah ditetapkan sebelumnya dan memanfaatkan perubahan pendapatan tahun anggaran berjalan, sehingga tidak terjadi surplus anggaran yang signifikan pada akhir tahun (Ratifah & Nuraeni, 2021). Dalam konteks pemerintahan daerah, *expenditure change* merupakan respon terhadap masalah teknis dan kebutuhan guna menyesuaikan program dengan anggaran serta mengubah kebutuhan karena adanya perubahan situasi dan lingkungan.

Fiscal Stress

Fiscal stress atau tekanan fiskal merupakan evaluasi kondisi keuangan yang menunjukkan pemerintah daerah menghadapi masalah anggaran yang terus meningkat dan kesulitan membiayai operasionalnya. Alan G. Hevesi (2006) menjelaskan bahwa pemerintah dengan anggaran sehat mampu membiayai layanan secara berkelanjutan dan mengatasi tekanan keuangan jangka pendek.

Ketika pendapatan pemerintah daerah menurun akan tetapi permintaan jasa tetap atau meningkat, akan terjadi *fiscal stress* seperti yang dikatakan oleh Dinapoli (2016). Kemandirian yang lebih besar dalam penerimaan untuk membiayai pengeluaran, bersamaan

dengan ketidakmampuan meningkatkan pendapatan daerah, juga dapat menjadi penyebab *fiscal stress.*

Legislature Size

Lembaga legislatif adalah badan penasehat yang umumnya dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki wewenang untuk membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang yang berbeda dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Di Indonesia, anggota legislatif atau DPRD mengucapkan sumpah saat dilantik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya sesuai Pasal 71 UU No.22/2003. Montesqueiu mengemukakan teori pembagian kekuasaan atau *trias politica*, di mana kekuasaan legislatif merupakan salah satu komponen pentingnya (Yossie Maysita R et al., 2018). Ada empat pihak dalam proses penganggaran: badan legislatif, kepala eksekutif, agenda dinas, dan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi ketiga pihak lainnya untuk mendukung program yang diinginkan (Nur et al., 2017).

Moch. Shulthoni (2019) menekankan bahwa fungsi legislatif yang penting adalah mewakili kebutuhan masyarakat, memberikan kekuatan kepada pemerintah, dan mengawasi kinerja pemerintah. Ketiga peran ini memberi legislatur kemampuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan.

***Rebudgeting in time over budget calculation* (P-SiLPA)**

SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) merupakan perbedaan antara jumlah yang diterima dan dibelanjakan dalam anggaran selama satu periode anggaran. Menurut Junita & Abdullah (2016), angka SILPA seharusnya sama dengan nol saat membuat APBD. SiLPA diterima pada awal tahun berjalan dan digunakan sebagai dasar untuk perubahan anggaran, terutama untuk penyesuaian belanja. Syukriy Abdullah & Riza Rona (2014) menekankan bahwa SiLPA terjadi sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya selesai, anggaran untuk periode tahun sekarang ditetapkan, sehingga jumlahnya akan berbeda dengan yang sesungguhnya dan mengharuskan perubahan anggaran.

Welhelmina Manafe et al. (2018) menyatakan bahwa SiLPA merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *expenditure change* tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, SiLPA sebagai pembiayaan yang diterima akan digunakan untuk tiga tujuan utama yaitu menutup kekurangan anggaran jika realisasi pendapatan lebih rendah dari realisasi belanja, memberikan dana untuk kegiatan lanjutan dan membayar kewajiban tambahan yang belum terselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap *Expenditure Change*

Saat pemerintah daerah tidak dapat menyeimbangkan anggaran tahunan dengan transaksi yang sedang berlangsung, maka akan terjadi *fiscal stress*. Junita & Abdullah (2016) menyatakan bahwa *fiscal stress* menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa anggaran, khususnya belanja, akan diubah. Keadaan ini menunjukkan bahwa daerah tidak memiliki kemampuan untuk membiayai semua kebutuhan yang ditanggungnya. Pemerintah daerah akan melakukan perubahan anggaran belanja yang lebih besar jika ada *fiscal stress* yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Fiscal stress* berpengaruh positif terhadap *expenditure change.*

Pengaruh *Legislature Size* Terhadap *Expenditure Change*

Anggaran murni dan perubahan tidak dapat dipisahkan, berdasarkan apa yang diteliti oleh Anessi et al dalam (Junita & Abdullah, 2016). Karena mereka memiliki kepentingan pribadi yang memungkinkan mereka untuk memenuhi janji mereka kepada pemilih dan memenuhi kebutuhan keuangan melalui insentif ekonomi, peran legislatif dalam pembuatan anggaran murni dan perubahan hampir identik (Syukriy Abdullah & Riza Rona, 2014). Legislatif tidak bebas dari kepentingan yang bertentangan dengan pemilih yang diwakilinya. Akibatnya, peneliti berpendapat bahwa ukuran parlemen memiliki dampak yang signifikan terhadap *expenditure change*. Nadia Fiorino & Roberto Ricciuti, (2007) menemukan bahwa *legislature size* memiliki efek positif yang signifikan. Mereka menemukan bahwa peningkatan 10% jumlah legislature akan menghasilkan peningkatan pengeluaran pemerintah per kapita sebesar 12%. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota legislatif, semakin besar anggaran yang dialokasikan atau belanja yang dialokasikan, atau semakin besar defisit anggaran. Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Legislature size* berpengaruh positif terhadap *expenditure change.*

Pengaruh *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* terhadap *Expenditure Change*

Untuk periode selanjutnya, sisa perhitungan anggaran yang diterima pada awal tahun berjalan dapat digunakan untuk SiLPA. Amran (2015) menunjukkan bahwa P-SiLPA merupakan perubahan pada sisa anggaran (penerimaan dan pengeluaran) yang diterima dan digunakan pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan nilai P-SiLPA yang besar akan meningkatkan *expenditure change* daerah pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran. Karena penetapan anggaran untuk periode tahun sekarang (periode – t) dilakukan sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran periode sebelumnya (periode t – 1) selesai, sisa anggaran periode tahun sebelumnya (periode t – 1) masih merupakan ramalan, sehingga jumlahnya tidak dapat dipastikan. Perbedaan ini menyebabkan anggaran harus disesuaikan saat jumlah sudah diketahui oleh Syukriy Abdullah & Riza Rona, (2014). Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Rebudgeting in time over budget calculation* (P-SiLPA) berpengaruh positif terhadap *expenditure change.*

Kerangka Konseptual

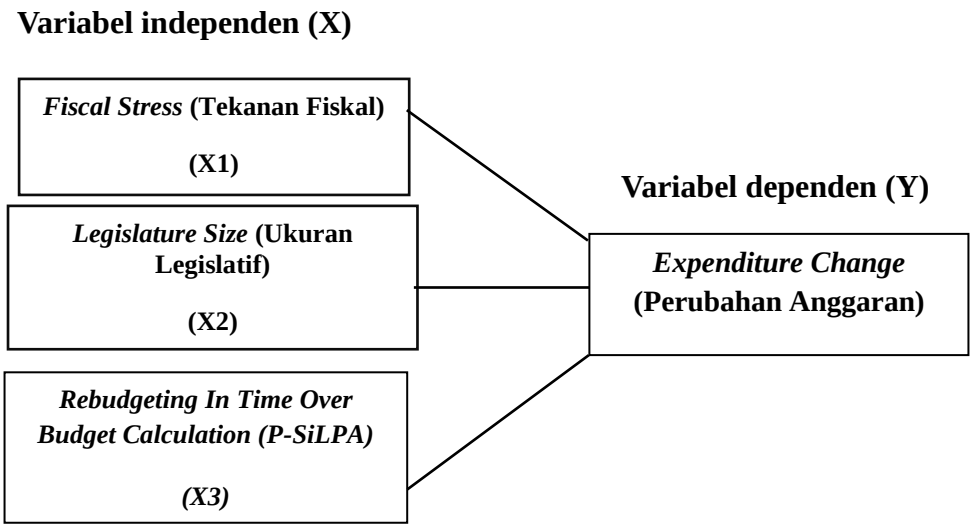

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diolah oleh instansi terkait yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit. Metode untuk pengumpulan data yang digunakan adalahostudi pustakaodanodokumentasi. Data LPKD pemerintah daerah diperoleh dari website resmi pemerintah daerah dan dari BPK RI dan untuk data APBD perubahan dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pemerintah daerah yang terkait. Data pada penelitian ini menggunakan periode tahun 2020-2022 untuk menggambarkan keadaan terbaru.

Sampel populasi yang digunanakan adalah pemerintah kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020-2022 kabupaten dan kota di Indonesia berjumlah 516 dengan rincian kabupaten berjumlah 418 dan kota berjumlah 98. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria. Metode ini memasukkan kategori *non-probability sampling*, yang berarti bahwa setiap populasi memiliki peluang yang berbeda untuk dijadikan sampel (Sugiyono,2017).

Tabel 1
Populasi dan Sampel

NO.	KETERANGAN	TOTAL
1	Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia 3 Tahun	1.542
2	Kabupaten dan Kota yang tidak mempublikasikan APBD perubahan	(685)
3	Kabupaten dan kota dengan data tidak lengkap (data SiLPA, PAD, Belanja modal, APBD Murni)	(412)
	JUMLAH SAMPEL	**445**

Berdasarkan perhitungan, sebanyak 445 sampel representatif ditemukan mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan tiga tahun, yaitu tahun 2020-2022 sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 445.

Variabel Penelitian & Pengukurannya

Expenditure Change

Expenditure change adalah perubahan alokasi anggaran yang mencakup perubahan pada kebijakan anggaran pemerintah daerah. Untuk memproyeksikan variabel ini, digunakan perbedaan antara anggaran belanja didalam APBD murni dan APBD perubahan.

$$\text{Expenditure Change} = \text{Anggaran Belanja dlm APBD P} - \text{Anggaran Belanja dlm APBD Murni}$$

Fiscal Stress

Fiscal stress muncul ketika penerimaan (pendapatan) tidak mencukupi untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Otonomi yang diharapkan akan membuat daerah lebih mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat, terjadi. Penelitian ini mengacu pada

penelitian Arnett, (2012), yang mengukur tingkat *fiscal stress* (FS) dengan membagi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total belanja daerah.

$$FS = \frac{PAD}{Total\ Belanja\ Daerah}$$

Legislature Size

Legislature size yang ditunjukkan oleh jumlah anggota Dewan Perwakilan menunjukkan banyaknya kepentingan dalam lembaga legislatif yang memengaruhi keputusan tentang *Expenditure change*. Salah satu cara untuk mengetahui berapa banyak anggota legislatif pada setiap kabupaten dan kota di Indonesia (Junita & Abdullah, 2016).

$$Legislature\ Size = \text{Jumlah Anggota DPRD}$$

***Rebudgeting in time over budget calculation* (P-SiLPA)**

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) adalah lebih dari anggaran tahun sebelumnya. Dikarenakan dibuat sebelum pertanggugjawaban dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya, Jumlah SiLPA anggaran tahun sebelumnya masih berupa perkiraan. Karena adanya perbedaan ini, ketika jumlah pastinnya sudah diketahui maka angka SiLPA harus disesuaikan (Arief Kurniawan dan Fefri Indra Arza, 2019).

$$P - SiLPA = \frac{SiLPA\ P\ APBD - SiLPA\ APBD\ Murni}{SiLPA\ APBD\ Murni}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif yang sudah dilakukan menunjukkan nilai rata-rata variabel *expenditure change* adalah sebesar 2.9654%, *fiscal stress* sebesar 0.1124, *Legislature size* sebesar 34.72 dan *Rebudgeting in time over budget calculation (P-SiLPA)* sebesar -0.0432.

Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Expenditure Change	445	-15.95%	19.64%	2.9654%	7.52879%
Fiscal Stress	445	0.00	0.29	0.1124	0.06556
Legislature Size	445	9	55	34.72	10.497
P-SiLPA	445	-1.04	1.20	-0.0432	0.48015
Valid N (listwise)	445				

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2025

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas yang sudah dilakukan, nilai probabilitas signifikansi pada penelitian ini sebesar 0.132 > 0.05 sehingga data pada model penelitian ini berdistribusi secara normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		445
Normal Parameters[a,b]	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	7.45813679
Most Extreme Differences	Absolute	0.038
	Positive	0.038
	Negative	-0.032
Test Statistic		0.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.132[c]

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2025

Uji Multikoleniaritas

Hasil yang ditunjukkan pada tabel 4 saat perhitungan uji multikolinearitas pada variabel *fiscal stress* berupa nilai Tolerance 0.720 dan VIF 1.389. Untuk variabel *legislature size* berupa nilai Toleracne sebesar 0.728 dan VIF 1.274. Kemudian untuk Variabel *rebudgeting in time over buget calculation* (P-SiLPA) memiliki nilai Tolerance sebesar 0.983 dan VIF sebesar 1.018.

Tabel 4
Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0.234	1.227		0.191	0.849		
	Fiscal Stress	-10.624	6.384	-0.093	-1.664	0.097	0.720	1.389
	Legislature Size	0.114	0.040	0.158	2.865	0.004	0.728	1.374
	P-SiLPA	0.470	0.746	0.030	0.630	0.529	0.983	1.018
a. Dependent Variable: *Expenditure Change*								

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2025

Uji Heteroskedastisitas

Hasil mengenai uji heteroskedastisitas untuk variabel-variabel penelitian dengan menggunakan uji Glejser menunjukkan hasil yang beragam. Dua variabel terbukti bebas dari masalah heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi diatas 0.05, variabel tersebut meliputi *Fiscal stress* (0.097) dan P-SiLPA (0.529). Namun, ditemukan indikasi heteroskedastisitas pada variabel *Legislature size* (0.004) yang memiliki nilai signifikansi dibawah 0.05. Walaupun demikian, model regresi ini masih dapat digunakan untuk analisis karena setelah

dicoba menggunakan transformasi logaritma natural pada variabel dependen sebagai salah satu upaya untuk mengatasi heteroskedastisitas signifikansi dari variabel ini tetap tidak lebih besar dari 0.05 dan keberadaan heteroskedastisitas tidak mempengaruhi sifat ketidakbiasan dan konsistensi dari estimator OLS, sehingga koefisien regresi yang dihasilkan tetap dapat diandalkan untuk interpretasi hubungan antar variabel dalam model.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.234	1.227		0.191	0.849
	Fiscal Stress	-10.624	6.384	-0.093	-1.664	0.097
	Legislature Size	0.114	0.040	0.158	2.865	0.004
	P-SiLPA	0.470	0.746	0.030	0.630	0.529
a. Dependent Variable: *Expenditure Change*						

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2025

Uji Autokorelasi

Hasil pertama uji autokorelasi (tabel 6) dengan menggunakan Durbin-Watson (DW) dapat diketahui nilai DW sebesar 1.279. Nilai dU yang didapat sebesar 1.861 dan 4 – dU sebesar 2.189. Dikarenakan nilai Durbin-Watson yang didapatkan harus lebih besar daripada dU dan lebih kecil dari nilai 4 – dU maka nilai yang ditunjukkan pada uji pertama (DW 1.279 < dU 1.861) menandakan adanya gejala autokorelasi. Sehingga perlu diperbaiki dengan menggunakan uji Durbin-Watson dengan metode *Cohcrone – Orcutt.* Sehingga menghasilkan nilai DW yang lebih besar dari uji pertama.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.137[a]	0.019	0.012	7.48346%	1.279
a. Predictors: (Constant), P-SiLPA, *Legislature Size, Fiscal Stress*					
b. Dependent Variable: *Expenditure Change*					

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2025

Nilai DW uji kedua (tabel 7) menggunakan metode *Cohcrone – Orcutt* menghasilkan nilai DW sebesar 2.136. Sehingga diperoleh dU (1.861) < 2.136 < 4 – dU (2.139). Dengan nilai tersebut didapat kesimpulan bahwa model regresi ini telah terhindar dari masalah autokorelasi.

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi Metode *Cochrane – Orcutt*

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.138[a]	0.019	0.012	6.96955	2.136
a. Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X1, LAG_X2					
b. Dependent Variable: LAG_Y					

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2025

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam uji analisis regresi linear berganda yang ditunjukkan dalam tabel *Coefficients*, dapat dibentuk persamaan berikut:
Y = 0.234 + (10.624)X1 + 0.114X2 + 0.470X3.

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.234	1.227		0.191	0.849
	Fiscal Stress	-10.624	6.384	-0.093	-1.664	0.097
	Legislature Size	0.114	0.040	0.158	2.865	0.004
	P-SiLPA	0.470	0.746	0.030	0.630	0.529
a. Dependent Variable: *Expenditure Change*						

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2025

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 9 nilai F hitung yang didapatkan saat dilakukan uji signifikansi simultan adalah sebesar 2.798 dengan nilai signifikansi 0.040 (p < 0.05). Nilai signifikasni yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa model regresi ini dinyatakan signifikan.

Tabel 9
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470.144	3	156.715	2.798	0.040[b]
	Residual	24696.969	441	56.002		
	Total	25167.113	444			
a. Dependent Variable: *Expenditure Change*						
b. Predictors: (Constant), P-SiLPA,*Legislature size, Fiscal Stress*						

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2025

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji signifikansi parsial (uji t) yang ditunjukkan tabel 10 dilakukan dengan membandingkan nilai t – tabel dengan t – hitung. Berdasarkan hasil yang diperoleh saat uji signifikansi parsial ditemukan bahwa untuk variabel *fiscal stress* menunjukkan nilai koefisien sebesar -10.624 dengan nilai t hitung -1.664 dan nilai signifikansi 0.097 mengindikasikan bahwa variabel ini memiliki arah negatf dan tidak signifikan terhadap *expenditure change* sehingga bertentangan dengan hipotesis pertama yang diajukan. Pada variabel *legislature size* menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.0114 dengan nilai t hitung sebesar 2.865 dan nilai signifikansi sebesar 0.004 yang mengindikasikan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap *expenditure change* sehingga mendukung hipotesis kedua.

Terakhir, untuk variabel P-SiLPA dengan koefisien sebesar 0.470, t hitung 0.630 dan nilai signifikansi sebesar 0.529 menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap *expenditure change* sehingga hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Dari ketiga hipotesis yang diajukan hanya variabel *legislature size* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *expenditure change,* sementara dua variabel lainnya ditolak karena tidak

sesuai dengan arah yang diajukan pada hipotesis sebelumnya atau tidak signifikan secara statistik.

Tabel 10
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.234	1.227		0.191	0.849
	Fiscal Stress	-10.624	6.384	-0.093	-1.664	0.097
	Legislature Size	0.114	0.040	0.158	2.865	0.004
	P-SiLPA	0.470	0.746	0.030	0.630	0.529
a. Dependent Variable: *Expenditure Change*						

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2025

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0.019 atau 1.9% yang mempunyai arti bahwa variabel independen secara bersama dalam model regresi hanya mampu menjelaskan sebanyak 1.9% dari variabel dependen (*Expenditure change*). Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0.012 atau 1.2% memberikan estimasi yang lebih konservatif dan disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model yang berarti hanya 1.2% variasi *expenditure change* yang dijelaskan oleh model.

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.137[a]	0.019	0.012	7.48346%	1.279
a. Predictors: (Constant), P-SiLPA, *Legislature Size*, *Fiscal Stress*					
b. Dependent Variable: *Expenditure Change*					

Sumber: data diolah dengan SPSS 25 tahun 2025

Pembahasan

Fiscal Stress* Berpengaruh Terhadap *Expenditure Change

Pengaruh *fiscal stress* menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap *expenditure change* dengan nilai koefisien sebesar -10.624 dan nilai signifikan sebesar 0.097 yang menunjukkan lebih besar dari 0.05. Hasil ini menjadi faktor penentu jika *fiscal stress* bukan faktor utama yang memengaruhi *expenditure change* pemerintah daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwasannya pemerintah daerah masih belum dapat mandiri dan masih bergantung pada pemerintah pusat untuk pendanaan, dimana PAD saja belum mencukupi kebutuhan operasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa *fiscal stress* berpengaruh signifkan terhadap *expeniture change*, perbedaan ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan dimana perilaku agen (pemerintah) tidak selalu responsif terhadap *fiscal stress* sebagaimana diprediksi. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kecenderungan pemerintah untuk mempertahankan pola belanja yang stabil demi menghindari resiko politik dan menjaga reputasi dalam pengelolaan keuangan sehingga walaupun menghadapi *fiscal stress* pemerintah tidak secara signifikan mengganti pola belanjanya.

Legislature Size Berpengaruh Terhadap *Expenditure Change*

Pengaruh *legislature size* pada *expenditure change* memiliki arah hubungan positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.114 dan nilai signifikansi sebesar 0.004 yang lebih kecil daripada 0.005. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota legislatif suatu daerah maka semakin tinggi pula *expenditure change.* Temuan ini sesuai dengan teori keagenan dimana sebagai perwakilan dari prinsipal (masyarakat), anggota legislatf ini memiliki wewenang untuk mengawasi dan menyetujui anggaran yang sudah diajukan oleh agen (pemerintah daerah). Jumlah anggota legislatif yang lebih besar memungkinkan pengawasan yang lebih insentif terhadap proses penganggaran yang dapat mendorong *expenditure change* untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini konsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh Junita dan Abdullah (2016) yang juga menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara *legislature size* dengan *expenditure change.*

Rebudgeting In time over Budget Calculation (P-SiLPA) Berpengaruh Terhadap *Expenditure Change*

P-SiLPA menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap *expenditure change* dengan nilai koefisien sebesar 0.470 dan nilai signifikansi sebesar 0.529 yang menunjukkan lebih besar dari 0.05. Hasil yang didapatkan ini berbeda dengan hasil dari penelitian Arief kurniawan & Fefri Indra Arza (2019) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan dimana penelitian yang dilakukan tersebut pemerintah daerah memiliki nilai P-SiLPA yang cenderung besar dan meningkatkan *expenditure change* pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran berlebih. Dalam perspektif teori keagenan tidak signifikannnya perubahan SiLPA ini dapat menunjukkan jika adanya mekanisme pengawasan yang efektif dari prinsipal (masyarakat/legislatif) yang membatasi keputusan agen (pemerintah) dalam menggunakan perubahan SiLPA untuk *expenditure change.* Penggunaaan P-SiLPA ini kemungkinan diatur secara ketat melalui regulasi atau pengawasan legislatif sehingga mengurangi kemungkianan agen bertindak dengan cara yang tidak rasional dalam melakukan *expenditure change* meskipun sisa anggaran sebelumnya masih tersedia.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) *Fiscal Stress* menunjukkan hubungan negatif terhadap *Expenditure Change* dengan koefisien -10.624, namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik (signifikansi 0.097 > 0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa *Fiscal stress* yang dihadapi pemerintah daerah tidak menjadi faktor penentu yang signifikan dalam *Expenditure change* pemerintah daerah. (2) *Legislature Size* menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap *Expenditure Change* dengan koefisien 0.114 dan signifikansi 0.004 < 0.05. Temuan ini menunjukkan bahwa *Legislature size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Expenditure change*. (3) P-SiLPA menunjukkan hubungan positif terhadap *Expenditure Change* dengan koefisien 0.470, namun pengaruh ini juga tidak signifikan secara statistik (signifikansi 0.529 > 0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya sisa lebih anggaran tahun sebelumnya tidak menjadi faktor penentu yang signifikan dalam *Expenditure change*.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini, yaitu periode penelitian yang digunakan relatif singkat yaitu hanya tiga tahun dari 2020-2022, sehingga belum dapat sepenuhnya

menggambarkan pola perubahan belanja daerah dalam jangka panjang. Periode ini juga bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 yang mungkin mempengaruhi pola pengelolaan keuangan daerah secara tidak normal. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen *yaitu Fiscal Stress, Legislature Size*, dan *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dalam menjelaskan *Expenditure Change*. Masih terdapat faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi *expenditure change* yang belum dimasukkan dalam model penelitian, seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, karakteristik kepala daerah, atau faktor politik lainnya.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Memperpanjang periode penelitian agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pola *Expenditure change*. Mempertimbangkan untuk menambah variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi *Expenditure change.*

DAFTAR PUSTAKA

Alan G. Hevesi. (2006). *Analysis of Fiscal Stress in New York State's Cities*.

Amran, & Dr. Darwanis, M. S. A. (2015). Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, Dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.

Arief Kurniawan, & Fefri Indra Arza. (2019). Pengaruh Fiscal Stress, Varians Anggaran Dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.

Arnett, S. B. (2012). *Fiscal Stress in the U.S. States: An Analysis of Measures and Responses*. http://scholarworks.gsu.edu/pmap_diss

Dinapoli, T. P. (2016). *Fiscal Stress Monitoring System*.

Gary C. Cornia, R. D. N. (2004). Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review*.

Junita, A., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Fiscal Stress Dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*, *20*(3). https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.10

Lee, T. M., & Plummer, E. (2007). Budget Adjustments in Response to Spending Variances: Evidence of Ratcheting of Local Government Expenditures. In *JOURNAL OF MANAGEMENT ACCOUNTING RESEARCH*.

Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2019). Bagaimana Pemerintah daerah merespon Fiscal Stress? *JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI VOLUME 10 No. 02 DESEMBER 2019*.

Lu, H., & Facer, R. L. (2004). Budget Change in Georgia Counties: Examining Patterns and Practices. *American Review of Public Administration*, *34*(1), 67–93. https://doi.org/10.1177/0275074003260437

Mei Susanto. (2018). *The Legislative Role in The Budgeting Process in Indonesia 1 Peran Lembaga Legislatif dalam Proses Penganggaran Negara di Indonesia*.

Moch. Shulthoni. (2019). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI BISNIS*.

Mutia Sari, & Fefri Indra Arza. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, *7*(1), 1425–1436. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive

Nadia Fiorino, & Roberto Ricciuti. (2007). Legislature size and government spending in Italian regions: Forecasting the effects of a reform. *Public Choice*, *131*(1–2), 117–125. https://doi.org/10.1007/s11127-006-9108-y

Nikmawati, Dr. Syukriy Abdullah, S. M. S. A., & Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, S. M. S. (2016). Analisis Korelasi Belanja Daerah Dalam Perubahan APBK Kabupaten/Kota. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, *11*(3), 39.

Nur, R., Dosen, P., Sosiologi, J., & Ub, F. (2017). *Politisi Anggaran Sektor Publik*.

Nur Rafli, M., & Fitria Sari, V. (2021). Pengaruh PAD, SiIPA, dan Fiscal Stress terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah. In *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 3). Online. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index

Ratifah, I., & Nuraeni, P. (2021). *Influence Of Fiscal Stress And Legislature Size On Expenditure Change*. https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/index

Ratifah, I. & Peni Nuraeni. (2021). Pengaruh Tekanan Fiskal Dan Ukuran Legislatif terhadap Perubahan Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, *13*(2). https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/index

Risha Dwi Lestari. (2019). *Analisis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik*.

Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). State and local fiscal structures and fiscal stress. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, *16*(1), 40–61. https://doi.org/10.1108/jpbafm-16-01-2004-b003

Syukriy Abdullah, & Riza Rona. (2014). *Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal* (Vol. 7, Issue 1).

Welhelmina Manafe, M. N., Ena, Z., Saul Adu, S., & Kristen Artha Wacana Kupang, U. (2018). FISCAL STRESS: Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. In *WAHANA* (Vol. 21, Issue 2).

Yossie Maysita R, Karmila Febbiazka, Reza Zikri F, & Mia Aprillianita. (2018). Fungsi Legislasi Dprd Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah. *Lampung University*.